



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK

JALAN PEMBANGUNAN, NIPAH KUNING, PONTIANAK 78000
LAMAM www.kkp.go.id SUREL supmptk@gmail.com

Kepada Yth.
Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan

16 April 2025

SURAT PENGANTAR
Nomor B.78/ SUPM.PTK/TU.210/IV/2025

No	Jenis yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025	1 Eks	Untuk digunakan sebagaimana mestinya



Pengirim
Koordinator SUPM Pontianak,
Sri Darmini

Diterima tanggal : 16 April 2025
Penerima :
Nama Jabatan :
Tanda Tangan :
Nama Lengkap :



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KKP
2025
#RISETOGETHER

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengukur pencapaian kinerja SUPM Pontianak pada Triwulan I Tahun 2025 yang didasarkan pada penetapan kinerja yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban yang transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran berdasarkan perencanaan strategi Instansi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SUPM Pontianak telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahunan Anggaran 2025.

Laporan Kinerja ini menguraikan tentang tingkat pencapaian kinerja kegiatan/sub-kegiatan yang ditetapkan dan dilengkapi dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja Kegiatan dan Sasaran Kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang diterapkan dalam Perjanjian Kinerja SUPM Pontianak tahun 2025.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian, kami senantiasa berupaya agar di tahun yang akan datang seluruh kegiatan yang menjadi tugas SUPM Pontianak dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, optimal, efektif, efisien, akuntabel, auditabel, dan dapat memenuhi keinginan semua pihak. Untuk itu, segala kritik dan saran perbaikan dari semua pihak akan kami terima dengan senang hati disertai penghargaan yang tinggi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja SUPM Pontianak yang disajikan dapat memberikan informasi pencapaian kinerja SUPM Pontianak selama Triwulan I Tahun 2025 serta sebagai masukan guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas dimasa mendatang.

Pontianak, 7 April 2025
Koordinator SUPM Pontianak,



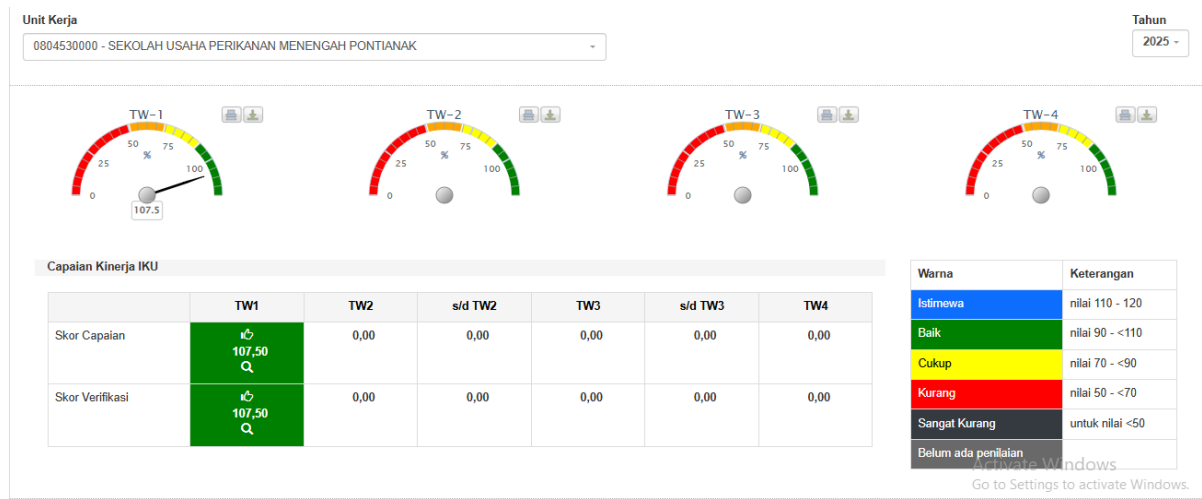
Sri Darmini, S.St.Pi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Keempat atas PERMEN KP 46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

Penetapan kinerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak Tahun 2025 sebanyak 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yang dibagi ke dalam 1 Sasaran Kegiatan pada level 3 berdasarkan PK tanggal 30 Januari 2025. Penyerapan anggaran pada Triwulan I tahun 2025 hanya pada belanja barang adalah sebesar Rp. 328,369,223,- atau sebesar 14.48% dari pagu belanja barang sebesar Rp. 2,267,658,000,- (pagu blokir sebesar Rp. 962,747,000,-) dari anggaran DIPA SUPM Pontianak tahun 2025 sebesar Rp. 5,430,547,000,-. Untuk pagu belanja pegawai sebesar Rp. 3,168.889,000,- tidak direalisasikan dikarenakan pembayaran belanja pegawai direalisasikan pada DIPA SUPM Tegal.

Pengukuran capaian kinerja SUPM Pontianak Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Aplikasi Kinerjaku pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja SUPM Pontianak di level 3 triwulan I tahun 2025 sebesar 107,50 %, sebagai mana dashboard kinerjaku berikut :



Pada Triwulan I Tahun 2025 SUPM Pontianak melaporkan 3 (tiga) Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) , dengan rincian IKU 1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%) berstatus hijau, IKU 3. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%) berstatus hijau, dan IKU 7. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak (%) berstatus hijau. Secara keseluruhan capaian Triwulan I Tahun 2025 untuk SUPM Pontianak sudah termasuk ke dalam kategori *baik*. Adapun rincian target dan realisasi dari 3 (tiga) IKK yang dilaporkan SUPM Pontianak tersebut adalah:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%) dengan target tahunan 85 %. Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 85 % dengan realisasi yang di capai sebesar 85 % dengan persentase 100%;
2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%) dengan target tahunan 80 %. Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 80 % dengan realisasi yang di capai sebesar 100 % dengan persentase 120%;
3. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak (%) dengan target tahunan sebesar 100 %. Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 24 % dengan realisasi yang dicapai sebesar 100 % dengan presentase 100 %.

Secara umum kinerja SUPM Pontianak sudah masuk dalam kategori baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. IKU dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan perlu dilakukan pengawalan dengan baik, guna memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat direlisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Verifikasi Capaian

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IKU, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh unit di Lingkup SUPM Pontianak dan merupakan laporan resmi terkait capaian kinerja SUPM Pontianak kepada unit di atasnya baik Pusdik KP selaku penanggung jawab Level II maupun BPPSDM KP sebagai Level I. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan telaahan dan evaluasi bagi SUPM Pontianak untuk peningkatan pengelolaan kinerja SUPM Pontianak. Akhir kata, SUPM Pontianak berharap dapat terus berkontribusi secara maksimal untuk mewujudkan masyarakat KP di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umum melalui penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan tingkat menengah.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Keragaan SDM SUPM Pontianak	6
E. Potensi dan Permasalahan	6
F. Sistematika Laporan Kinerja	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 8
A. Rencana Strategis	8
1. Visi	10
2. Misi	11
3. Tujuan	11
4. Sasaran Strategis	12
B. Rencana Kerja Tahun 2025	13
C. Perjanjian Kinerja	13
D. Pengukuran Kinerja	14
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 16
A. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2025	16
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	17
C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2025	26

BAB IV PENUTUP	29
A. Capaian Kinerja Utama	29
B. Permasalahan dan Rekomendasi	30
LAMPIRAN.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rencana Kerja Tahun 2025	13
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja SUPM Pontianak Tahun 2025.....	14
Tabel 3.	Capaian Kinerja Tahun Triwulan I 2025	16
Tabel 4.	Capaian IKU 1 Triwulan I Tahun 2025	18
Tabel 5.	Perbandingan capaian IKU 1 Triwulan 1 Tahun 2025	19
Tabel 6.	Capaian IKU 3 Triwulan I Tahun 2025.....	21
Tabel 7.	Perbandingan capaian IKU 3 Triwulan 1 Tahun 2025	22
Tabel 8.	Capaian IKU 7 Triwulan I Tahun 2025	25
Tabel 9.	Perbandingan capaian IKU 7 Triwulan 1 Tahun 2025	26
Tabel 10.	Realisasi Anggaran Triwulan I	27
Tabel 11.	Realisasi Anggaran per jenis belanja	27
Tabel 12.	Realisasi Anggaran TW I Berdasarkan Indikator Kinerja.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi SUPM Pontianak	5
Gambar 2. Dashboard Kinerja Triwulan I Tahun 2025	16
Gambar 3. Dashboard Kinerja SUPM Pontianak	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diatur pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SUPM Pontianak berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dan dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun serta menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja SUPM Pontianak yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran, serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Triwulan I Tahun 2025.

Hasil kinerja dari Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak yang sudah ditargetkan melalui Perjanjian Kinerja yang akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan tingkat kinerja yang dicapai Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang.

Dasar pelaksanaan kegiatan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak tahun 2025, mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang mengatur

kelembagaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2022 tentang Revitalisasi PendidikanVokasi dan Pelatihan Vokasi.
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kelembagaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

B. TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja SUPM Pontianak ini, bertujuan:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SUPM Pontianak untuk meningkatkan kinerjanya.

c. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Keempat atas PERMEN KP 46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, SUPM Pontianak mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan fungsi:

- a. Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa SUPM Pontianak di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- b. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa dan masyarakat; dan
- d. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, SUPM Pontianak didukung oleh Plt SUPM Pontianak merangkap Koordinator sebagai berikut:

a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Bidang kesiswaan dipimpin oleh seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SUPM Pontianak dengan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan SUPM Pontianak terkait tugas pokok dan fungsi kesiswaan. Bidang kesiswaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa SUPM Pontianak di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- 2) Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa dan Taruna;
- 3) Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- 4) Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua siswa/Taruna dan masyarakat; dan
- 5) Pengelolaan urusan rumah tangga kesiswaan.

b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengajaran

Bidang pengajaran dipimpin oleh seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SUPM Pontianak dengan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup SUPM Pontianak terkait tugas pokok dan fungsi pengajaran. Bidang pengajaran menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa SUPM Pontianak di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- 2) Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua siswa/Taruna dan masyarakat; dan
- 4) Pengelolaan urusan rumah tangga pengajaran.

c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Pendidikan

Bidang sarana pendidikan dipimpin oleh tenaga kependidikan yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SUPM Pontianak dengan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup SUPM Pontianak terkait tugas pokok dan fungsi bidang sarana pendidikan. Bidang sarana pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa SUPM Pontianak di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- 2) Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan masyarakat; dan
- 4) Pengelolaan urusan rumah tangga sarana pendidikan

d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat

Bidang hubungan masyarakat dipimpin oleh seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SUPM Pontianak dengan tugas

melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup SUPM Pontianak terkait tugas pokok dan fungsi bidang hubungan masyarakat. Bidang hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

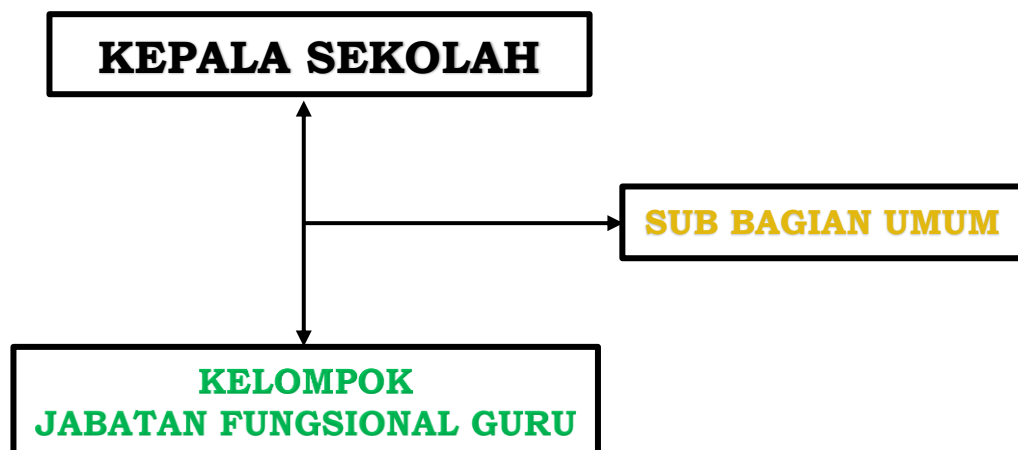
- 1) Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa SUPM Pontianak di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- 2) Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa/Taruna dan masyarakat; dan
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga hubungan masyarakat.

e. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang diangkat berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan dan merupakan jabatan Struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SUPM dengan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan SUPM Pontianak. Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran SUPM Pontianak;

Struktur organisasi SUPM Pontianak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 88/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Keempat atas PERMEN KP 46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi SUPM Pontianak

D. KERAGAAN SDM SUPM PONTIANAK

SUPM Pontianak didukung oleh 57 Orang Pegawai yang terdiri dari 38 orang PNS (66,66%), 13 orang Tenaga Kontrak PPNPM (22,80%) dan 7 orang tenaga PJLP (12,28%).

E. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi

Keberadaan SUPM Pontianak memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan. Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran BPPSDM KP di bidang pendidikan didukung keberadaan 20 satuan pendidikan, yang terdiri atas 1 (satu) Politeknik untuk D-IV, 9 (sembilan) Politeknik KP, 5 (Lima) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 1 (satu) Akademi Komunitas, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan teaching factory dengan 70% praktek dan 30% teori.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi adalah belum adanya STOK yang baru bagi SUPM Pontianak sehingga dalam pengelolaan anggaran hanya terbatas pada manajerial dalam pelaksanaan program untuk mendukung pembangunan KP antara lain yaitu Proses STOK yang sampai sekarang belum terbentuk, pengelolaan anggaran sebatas manajerial (belanja barang), anggaran baru dialokasikan pada bulan Januari 2025 dan saat ini terdampak efesensi anggaran, status kepegawaian masih berada di SUPM Tegal.

Permasalahan yang secara khusus terjadi pada SUPM Pontianak yang perlu segera dilakukan pembenahan adalah:

- a. Kejelasan STOK bagi SUPM Pontianak.
- b. Status kepegawaian masih di SUPM Tegal.
- c. Peran SUPM Pontianak masih diperlukan untuk pendidikan KP di wilayah Kalimantan Barat.

- d. SDM pendidik masih terbatas di mana belum semua SDM telah memiliki sertifikasi keahlian.

F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

Merujuk Keputusan Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja, dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia dan Kelautan dan Perikanan, sistematika penyajian laporan kinerja sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar, berisi pengantar laporan dan dilengkapi dengan tandatangan Kepala Satker dan stempel basah.
- b. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan, meliputi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025.
- c. Bab I Pendahuluan, berisi gambaran umum tentang organisasi SUPM Pontianak seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di SUPM Pontianak.
- d. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi tentang Rencana Strategis SUPM Pontianak 2025 – 2029, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja SUPM Pontianak Tahun 2025 serta pengukuran kinerja.
- e. Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
- f. Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
- g. Lampiran, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDM, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) tahun 2025 – 2029 (Renstra masih berbentuk draft), mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Peran strategis keberadaan BPPSDMKP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pengembangan SDM. Peran strategis BPPSDMKP meliputi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 2) Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;

- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network/komunikasi*, sedangkan *society 5.0* merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber- physical-human systems*. Pada era *society 5.0* manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga keseimbangan maupun keharmonisan. Situasi ini akan memberikan peluang bagi BPPSDM KP untuk berinovasi dalam hal teknologi, struktur organisasi/kelembagaan, dan aturan/kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, BPPSDM KP melakukan penyusunan Reviu Renstra 2025- 2029, untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KKP serta sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 yaitu mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1. VISI

Visi Pusdik KP mengacu pada Visi BPPSDM KP adalah “Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-

royong melalui kegiatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan berkualitas”. Visi SUPM Pontianak Mengacu pada Visi Pusdik adalah **“SUPM Pontianak Mampu menjadi pusat rujukan (Center of Excellence) bagi SMK Perikanan/Universitas di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan sekitarnya”**.

Visi dimaksud mengandung idealisme dan makna bahwa SUPM Pontianak siap untuk menghasilkan sumberdaya manusia KP yang kompeten:

1. Memiliki kepribadian yang bertaqwa dan bemoral;
2. Terampil, kreatif dan mandiri dengan etos kerja tinggi yang mampu bersaing dalam memanfaatkan peluang lapangan kerja maupun berusaha di bidang kelautan dan perikanan

2. MISI

Misi SUPM Pontianak sebagai salah satu UPT lingkup Pusdik KP mengacu pada misi Pusdik KP mengacu BPPSDM KP yang mengacu pada misi KKP yakni :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Misi ke-2 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

3. Tujuan

Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Pusdik KP dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2025 – 2029. adalah:

1. Menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan.
2. Memperluas akses pendidikan dengan berbasis digital/teknologi (*e-learning*) bagi anak pelaku utama pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan.
3. Menjadikan satuan pendidikan sebagai pusat rujukan (*center of*

excellence) oleh satuan pendidikan di Indonesia.

4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial SDM secara efektif dan efisien.
5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial SDM secara efektif dan efisien
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pusat Pendidikan KP.

Tujuan Pusdik KP ini kemudian dijabarkan lagi dalam tujuan SUPM Pontianak berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

1. Tersedia lulusan yang kompeten dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan sektor KP yang berkelanjutan.
2. Memperluas akses pendidikan dengan berbasis digital/teknologi (*e-learning*) bagi anak pelaku utama pada SUPM Pontianak.
3. SUPM Pontianak mampu menjadi pusat rujukan (*center of excellence*) bagi SMK Perikanan/ Universitas di Wilayah Provinsi Pontianak dan Sekitarnya.
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial SDM SUPM Pontianak secara efektif dan efisien.
5. Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan di SUPM Pontianak.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan SUPM Pontianak.

4. Sasaran Strategis

Renstra SUPM Pontianak Tahun 2025 – 2029 menjelaskan bahwa sasaran kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh SUPM Pontianak sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan target dan kondisi yang diinginkan dapat tercapai oleh PUSDIK KP.

Sasaran Kegiatan Pusdik KP sebagai turunan dari Sasaran Strategis BPPSDM KP adalah sebagai berikut:

1. SK1, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Kegiatan PUSDIK KP diatas kemudian diturunkan pada level SUPM Pontianak:

1. SK 1, Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker;

Sasaran Kegiatan (SK 1) yang akan dicapai adalah “Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja :

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%) tahun 2025 dengan target 85 %, namun pada Tahun 2024 IKU ini tidak dimunculkan.
2. Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai) tahun 2025 dengan target 80 %, namun pada Tahun 2024 IKU ini tidak dimunculkan.
3. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%) tahun 2025 dengan target 80 %, namun pada Tahun 2024 IKU ini tidak dimunculkan.
4. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Pontianak (%) dengan target 80 %, namun pada Tahun 2024 IKU ini tidak dimunculkan.
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai) target 88 pada Tahun 2020, menjadi 89 pada tahun 2022, menjadi 93,75 pada tahun 2023, menjadi 93,76 pada Tahun 2024 dan menjadi 92 pada Tahun 2025
6. Nilai kinerja perencanaan anggaran SUPM Pontianak (nilai) target 75 pada tahun 2024, dan menjadi 71,5 pada tahun 2025
7. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak (%) pada Tahun 2020 – 2022 IKU ini bernama “Persentase layanan dukungan manajemen internal SUPM Pontianak (%)” dengan target 100 % pada tahun 2020 sampai dengan 2024, namun pada Tahun 2023 IKU ini tidak dimunculkan dan muncul kembali pada IKU

2025 dengan nama Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak (%) dengan target 100 %.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, dan misi, maka Rencana Kerja SUPM Pontianak mengikuti program yang telah ditetapkan oleh BPPSDM KP Tahun 2025 yaitu Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan, besar pagu anggaran SUPM Pontianak sebesar Rp. 5,430,547,000 dengan rincian output:

Tabel 1. Rencana Kerja Tahun 2025 SUPM Pontianak

No.	Jenis Output	Pagu Anggaran Awal (Rp)	Revisi Anggaran Terakhir (Rp)
1.	Layanan Manajemen Keuangan	5,430,547,000	5,430,547,000

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan, untuk nantinya menjadi dasar penyusunan target pada indikator kinerja utama di PK SUPM Pontianak tahun 2025.

C. PERJANJIAN KINERJA

Target dan sasaran pencapaian kinerja SUPM Pontianak tahun 2025 merupakan turunan untuk mendukung tercapainya target dan sasaran Pusdik KP tahun 2025. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Pusdik KP dan SUPM Pontianak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran Kegiatan SUPM Pontianak. IKU SUPM pada Perjanjian Kinerja (PK) Level 3 BPPSDM Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025, terdiri dari 1 Sasaran Kegiatan dengan 7 IKU. Pada tahun 2025 SUPM Pontianak baru menerima pagu anggaran sesuai dengan DIPA revisi pada tanggal 2 Desember 2024,

dengan demikian dibuatlah Perjanjian Kinerja (PK) untuk triwulan I yang telah di tanda tanganin oleh Kapusdik pada tanggal 30 Januari 2025.

Adapun Indikator Kinerja dengan rincian dan target pada tahun 2024, sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja SUPM Pontianak Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)	85
		2	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai)	80
		3	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)	80
		4	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Pontianak (%)	80
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	92
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	71,5
		7	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak (%)	100

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5.430.547.000
Total Anggaran SUPM Pontianak Tahun 2025		5.430.547.000

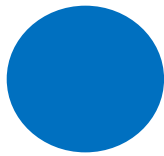
D. PENGUKURAN KINERJA

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja SUPM Pontianak Triwulan I Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;

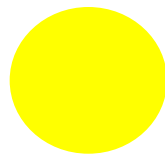
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



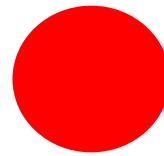
Istimewa
(110 - 120)



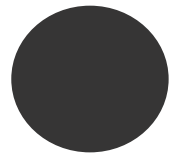
Baik
(90 - < 120)



Cukup
(70 - < 90)



Kurang
(50 - < 70)



Sangat Kurang
(< 50)

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator.

2. Metode Pengukuran Kinerja

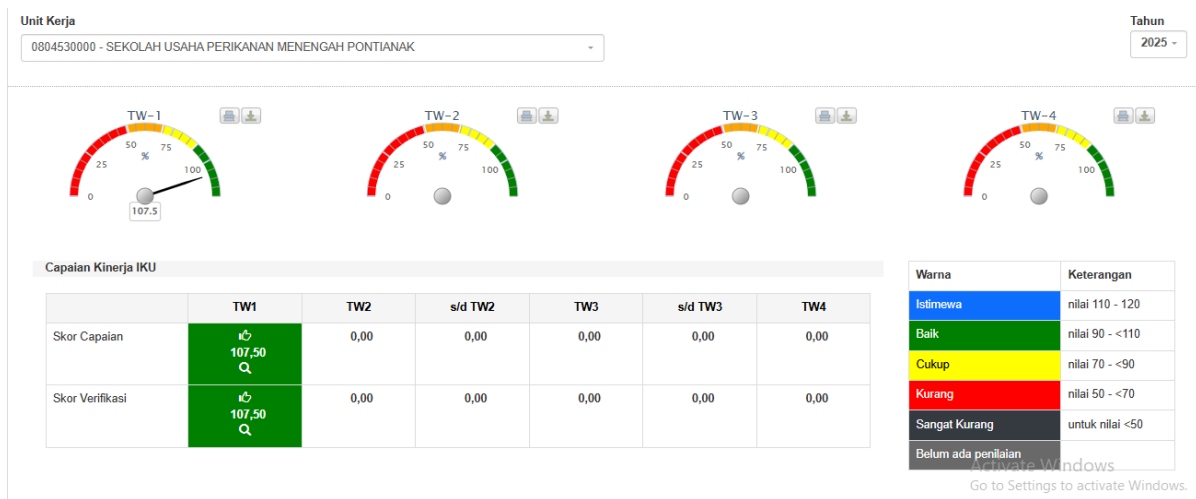
Metode pengukuran kinerja SUPM Pontianak dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember yang mana laporan kinerja di bulan Desember merupakan akumulasi nilai kinerja yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PRESTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja SUPM Pontianak Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance *indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Aplikasi Kinerjaku pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian SUPM Pontianak Triwulan I Tahun 2025 sebesar 107,50%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 2. Dashboard Kinerjaku Triwulan I Tahun 2025 Level 3 SUPM Pontianak

Pada Triwulan I tahun 2025, terdapat 3 (tiga) target kinerja yang sudah berstatus Hijau. Adapun capaian Kinerja pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TRIWULAN I		%
					T	R	
1	Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)	85	85	85	100
		2	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai)	80	0	0	0

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	3	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)	80	80	100	120
	4	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Pontianak (%)	80	0	0	0
	5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	92	0	0	0
	6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	71,5	0	0	0
	7	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak (%)	100	24	24	100

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SUPM Pontianak. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran - sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi SUPM Pontianak yang menjadi kontrak kinerja pada tahun 2025 dapat tercapai.

Sasaran Kegiatan 1 : Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Kegiatan 1

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)

Sesuai dengan Nota dinas dari Itjen Nomor : 397/ITJ.0/TU.140/IV/2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja

Unit Eselon I Lingkup KKP” Triwulan I Tahun 2025, diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2025 (Triwulan I Tahun 2025).

hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak merupakan indikator yang menunjukkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Itjen KKP dari hasil audit, revidu dan evaluasi yang telah diterbitkan (selama periode pengukuran), ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak.

Tabel 4. Capaian IKU 1: Persentase rekomendasi hasil pengawasan SUPM Pontianak yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja SUPM Pontianak (%)

IKU-1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)									
Realisasi TW I				2025				Rencana Kegiatan SUPM Pontianak 2025 – 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
100	100	75	0	85	85	100	85	85	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pada Triwulan I Tahun 2025 Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak dengan target 85% memperoleh realisasi sebesar 85% atau persentase capainnya sebesar 100% dari target. Capaian ini sebagaimana Surat Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2025 Lingkup BPPSDM KP” Nomor : B.3218/BPPSDM.1/HP.510/IV/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2025 Lingkup BPPSDM KP”. Pada Triwulan I Tahun 2024 SUPM Pontianak tidak ada Perjanjian kinerja dikarenakan anggaran SUPM Pontianak hanya Rp. 1.000,- sehingga target Triwulan I Tahun 2025 mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan sebesar 100%.

Faktor penyebab Keberhasilan pencapaian indikator ini adalah percepatan penyelesaian temuan, serta pendampingan penyelesaian tindak lanjut temuan yang dilakukan oleh tim Itjen KKP.

Kegiatan pendukung keberhasilan IKU ini adalah diperoleh diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 (Triwulan IV Tahun 2024). yang berstatus Tuntas.

Tabel 5. : Perbandingan capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan SUPM Pontianak yang di manfaatkan untuk perbaikan Kinerja SUPM Pontianak Dengan SUPM lain.

NO	Unit Kerja	Target IKU TW I 2025 (%)	Capaian IKU TW I 2025 (%)	Persentase Capaian (%)
1	SUPM Tegal	85,00	80,43	94,62
2	SUPM Ladong Aceh	85,00	85,00	100,00
3	SUPM Pariaman	85,00	85,00	100,00
4	SUPM Kota Agung	85,00	85,00	100,00
5	SUPM Pontianak	85,00	85,00	100,00
6	SUPM Sorong	85,00	85,00	100,00
7	SUPM Waecheru	85,00	85,00	100,00

Tabel di atas menunjukan bahwa perbandingan Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak dengan target IKU yang sama dan Capaian IKU yang sama juga sehingga Capaian IKU yaitu 85 dari target 85 dengan persentase capaian 100 %.

Indikator Kinerja Kegiatan 2

Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang

biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Penilaian Mandiri SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Penilaian Mandiri SAKIP Unit kerja merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP yang ada di Unit kerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada akhir Tahun 2025 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Indikator Kinerja Kegiatan 3

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Sesuai dengan Nota dinas dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 2/SJ.7/TU.140/IV/2025 perihal Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I Tahun Anggaran 2025, Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Capaian IKU 3 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)

IK 3. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)									
Realisasi TW I				2025				Rencana Kegiatan SUPM Pontianak 2025 – 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	80	100	120	100	80	120

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pada Triwulan I Tahun 2025 Indikator Kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak dengan target 80% memperoleh realisasi sebesar 100% atau persentase capainnya sebesar 120% dari target. Capaian ini sebagaimana Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : B.3241/BPPSDM.1/PL.410/IV/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I TA. 2025. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan sebesar 100% dikarenakan IKU ini adalah IKU baru yang tidak di targetkan pada tahun-tahun sebelumnya sedangkan perbandingan persentase capaian kinerja terhadap target Renstra Tahun 2025 sebesar 120%.

Faktor penunjang keberhasilan IKU ini adalah dengan melakukan update data pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) secara berkala.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah adanya monitoring data pengadaan setiap saat oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa SEKJEN KKP serta bagian PBJ BPPSDM KP.

Tabel 7. Perbandingan capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak dengan SUPM lain

NO	Unit Kerja	Target IKU TW I 2025 (%)	Capaian IKU TW I 2025 (%)	Persentase Capaian (%)
1	SUPM Tegal	80	100	120
2	SUPM Ladong Aceh	80	100	120
3	SUPM Pariaman	80	100	120
4	SUPM Kota Agung	80	100	120
5	SUPM Pontianak	80	100	120
6	SUPM Sorong	80	100	120
7	SUPM Waeheru	80	100	120

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbandingan capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak dengan SUPM lain dengan target IKU yang sama dan capaian IKU yang sama sehingga capaian IKU SUPM Pontianak yaitu 100 dari target 80 dengan persentase capaian 120%.

Indikator Kinerja Kegiatan 4

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Pontianak (%)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Pontianak adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN di SUPM Pontianak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur yaitu Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025, Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%), Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%), Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%), Tersedianya usulan

Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%), Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%), Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%), Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%). Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada akhir Tahun 2025 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Indikator Kinerja Kegiatan 5

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)

IKU Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran SUPM Pontianak (Nilai) merupakan alat ukur untuk menentukan Tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variable - variabel yang terkait dengan pelaksana anggaran sebagai indikatornya, yaitu Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Pengelolaan Uang Persediaan (10%), Penyelesaian Tagihan (bobot 20%) Deviasi Halaman III DIPA (11), Penyampaian Data Kontrak, Penyampaian LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian Kesalahan SPM, Dispensasi SPM, Renkas/RPD Harian, Retur SP2D (masing-masing 5 %). Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada Triwulan berikutnya atau pada Semester I Tahun 2025 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Indikator Kinerja Kegiatan 6

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKAKL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya keadaan kebijakan Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada Triwulan berikutnya atau pada Semester I Tahun 2025 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Indikator Kinerja Kegiatan 7

Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak (%)

Layanan Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak meliputi layanan bagian umum, laporan keuangan dan CALK, laporan pengelolaan persuratan dan kearsipan, laporan pelayanan publik, laporan SPIP, dan laporan BMN.

- a. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- b. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal

(buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.

- c. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain

Capaian IKU Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak (%) pada tahun 2025 adalah 100 % dari target 100 %. Capaian atas Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian IKU 7 Triwulan I Tahun 2025

IKU-1. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak (%)								
Realisasi TW I Tahun			2025				Renstra SUPM Pontianak 2025 – 2029	
2022-2024								
2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW I tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	100	-	24	24	100	0	100	24

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pada Triwulan I Indikator Kinerja Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak ditargetkan 24 % pada triwulan I dan capaian Indikator IKU ini adalah 24 % atau dengan persentase sebesar 100 %. Capaian ini sebagaimana surat Rekapitulasi Dokumen pendukung yang merupakan Capaian IKU Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 belum mengalami kenaikan sedangkan capaian kinerja terhadap target Renstra 2025 adalah 100%.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan di masing-masing bidang layanan umum, layanan organisasi dan tata kelola internal, Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan, layanan kehumasan, layanan data dan informasi, Pelayanan publik, dan layanan perkantoran untuk mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

Faktor Penunjang keberhasilan IKU ini adalah diperoleh dari Pelaksanaan Kegiatan dan tertibnya Pelaporan bidang layanan bagian umum, laporan keuangan dan CALK, laporan pengelolaan persuratan dan kearsipan, laporan pelayanan publik, laporan SPIP, dan laporan BMN.

Tabel 9. Perbandingan capaian IKU Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak dengan SUPM Lain

NO	Unit Kerja	Target IKU TW I 2025 (%)	Capaian IKU TW I 2025 (%)	Persentase Capaian (%)
1	SUPM Tegal	24	24	100
2	SUPM Ladong Aceh	22	22	100
3	SUPM Pariaman	22	22	100
4	SUPM Kota Agung	21	21	100
5	SUPM Pontianak	24	24	100
6	SUPM Sorong	28	28	100
7	SUPM Waeheru	25	25	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbandingan capaian IKU Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak dengan SUPM lain dengan target IKU yang berbeda dan capaian IKU yang berbeda juga sehingga capaian IKU SUPM Pontianak pada Triwulan I yaitu 24 dari target 24 dengan persentase capaian 100 %.

Selain itu Rekapen jenis Laporan pada IKU ini yang mana data tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TRIWULANI I TAHUN 2025

Dalam rangka mencapai IKU yang telah ditetapkan pada Triwulan I tahun anggaran 2025, SUPM Pontianak mengelola anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 5.430.547.000,- yang bersumber dari APBN Rupiah Murni dan dari dana PNPB sebesar Rp. 0,-. Realisasi anggaran sampai dengan Maret 2025 sebesar Rp. 328,369,223,- (14.48%). Rincian realisasi anggaran SUPM Pontianak pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 10. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Sasaran Kegiatan.

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN DIPA TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5.430.547.000	328,369,223	14.48
	JUMLAH ANGGARAN	5.430.547.000	328,369,223	14.48

Tabel 11. Realisasi Anggaran per jenis belanja pada Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu awal (Rp)	Pagu Blokir / Efisiensi (Rp)	Realisasi OMSPAN	%
1	Belanja Pegawai	3,168.889,000	3,168.889,000	0	0
2	Belanja Barang	2,267,658,000	962,747,000	328,369,223	14.48
3	Belanja Modal (53)				
	TOTAL	5.430.547.000	2.206142	328,369,223	14.48

Secara umum kinerja SUPM Pontianak pada Triwulan I Tahun 2025 setelah di efisiensi realisasi sebesar Rp. 328,369,223,- efisiensi ini berdasarkan instruksi presiden tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan berdasarkan pada Pentunjuk Operasional Kegiatan (POK). Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama SUPM Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Realisasi Anggaran TW I Berdasarkan Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		KOMPONEN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)	Keperluan sehari-hari perkantoran	277.488.000	277.488.000
2.	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai)	Keperluan sehari-hari perkantoran	-	-
3.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)	Keperluan sehari-hari perkantoran	-	-
4.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Pontianak (%)	Keperluan sehari-hari perkantoran	-	-

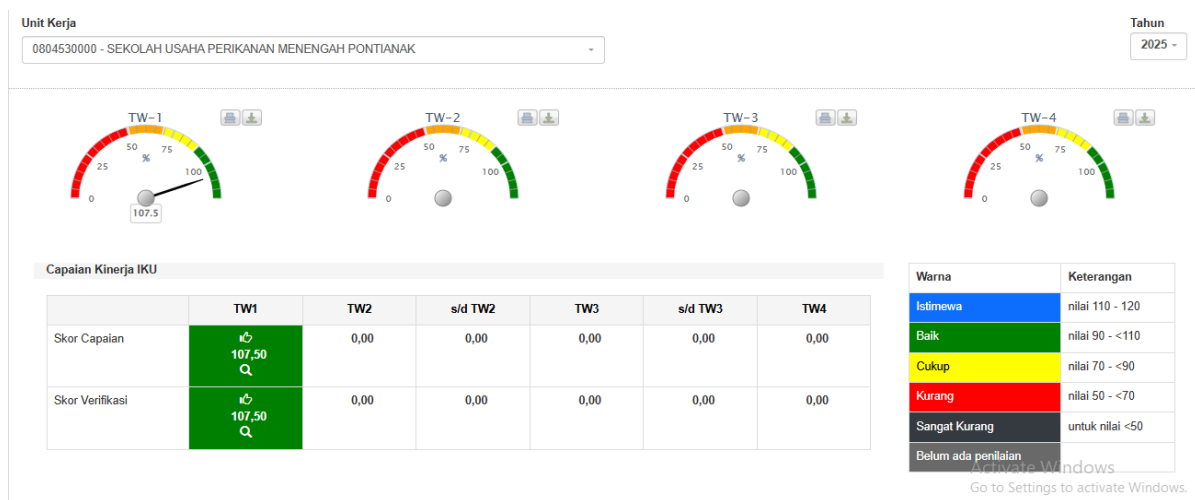
5.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	Keperluan sehari-hari perkantoran	-	-
6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	Keperluan sehari-hari perkantoran	-	-
7.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak (%)	Keperluan sehari-hari perkantoran	-	-

BAB IV

PENUTUP

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada tahun 2025, SUPM Pontianak memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Kegiatan dan 7 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja SUPM Pontianak pada Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja SUPM Pontianak di tingkat korporat Triwulan I Tahun 2025 sebesar 107,50%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 3. Dashboard Kinerjaku SUPM Pontianak

Pada Triwulan I Tahun 2025 SUPM Pontianak melaporkan 3 (tiga) Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) , dengan rincian IKU 1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%) berstatus hijau, IKU 3. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)

berstatus hijau, dan IKU 7. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak (%) berstatus hijau. Secara keseluruhan capaian Triwulan I Tahun 2025 untuk SUPM Pontianak sudah termasuk ke dalam kategori *baik*. Adapun rincian target dan realisasi dari 3 (tiga) IKK yang dilaporkan SUPM Pontianak tersebut adalah:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%) dengan target tahunan 85 %. Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 85 % dengan realisasi yang di capai sebesar 85 % dengan persentase 100 %;
2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%) dengan target tahunan 80 %. Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 80 % dengan realisasi yang di capai sebesar 100 % dengan persentase 120 %;
3. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak (%) dengan target tahunan sebesar 100 %. Pada Triwulan I Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 24 % dengan realisasi yang dicapai sebesar 100 % dengan presentase 100 %.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja SUPM Pontianak sudah Baik pada Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat dari Dashboard kinerja yang bertatus warna hijau dengan capaian 107,50%, Namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. IKU dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan perlu dilakukan pengawalan dengan baik, guna memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Verifikasi Capaian

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IKU, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh unit di Lingkup SUPM Pontianak dan merupakan laporan resmi terkait capaian kinerja SUPM Pontianak kepada unit di atasnya baik Pusdik KP selaku penanggung jawab Level II maupun BPPSDM KP sebagai Level I. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan telaahan dan evaluasi bagi untuk peningkatan pengelolaan kinerja SUPM Pontianak. Akhir kata, SUPM Pontianak berharap dapat terus berkontribusi secara maksimal untuk mewujudkan masyarakat KP di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umum melalui penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan tingkat menengah.

**LAMPIRAN -
LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sri Darmi**

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Usaha Perikanan Menengah
(SUPM) Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Alan Frendy Koropitan**

Jabatan : Plt.Kepala Pusat Pendidikan KP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah
Usaha Perikanan Menengah (SUPM)
Pontianak

Sri Darmi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PONTIANAK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)	85
		2	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai)	80
		3	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)	80
		4	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Pontianak (%)	80
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	92
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	71,5
		7	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pontianak (%)	100

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5.430.547.000
Total Anggaran SUPM Pontianak Tahun 2025		5.430.547.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan


Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah
Usaha Perikanan Menengah (SUPM)
Pontianak


Sri Darmini